

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian dan Sosiologis)*. Kencana.
- Bakhri, S. (2012). *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Gramata Publishing.
- Bisri, C. H. (1998). *Peradilan Agama di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group.
- Effendi. (2018). *Sistem Peradilan Pidana*. Media Pressindo.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. W. (2001). *American Law an Introduction*. Tatanusa.
- Hamzah, A. (1984). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika .
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi*. Sinar Grafika.
- Hartono. (2012). *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- HS, S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- HS, S. (2010). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Loudoe, J. Z. (1981). *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek* . PT Bina Aksara.
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju.
- Makarao, M. T., & Suhasril. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Ghalia Indonesia.
- Marpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber: Cyber Crime*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Mochtar, A. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* . Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mulyadi. (1996). *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*. Djambatan.

- Nugroho, S. A. (2002). *Praktik Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Indonesia*. Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Nugroho, S. A. (2010). *Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain*. Prenada Media.
- Paslyadja, A. (2010). *Hukum Pembuktian*. Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Prinsts, D. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Djambatan.
- Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana*. Sumber Ilmu Jaya.
- Rato, D., & Soerodjo, I. (2010). *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo.
- Sabuan, A. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Angkasa.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju.
- Shidarta, & Darmodiharjo, D. (2012). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1996). *Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya*. CV Politea.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Penerbit Qiara Media.
- Subekti, R. (2018). *Hukum Pembuktian*. Balai Pustaka.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1976). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*. Pradnya Paramita.
- Syah, M. I. (2018). *Hukum Bisnis Online Era Digital*. CV. Campustaka.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara*. Refika Aditama.
- Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi: Cybercrime Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Asswaja Pressindo.

B. JURNAL

- Barkatullah, A. H. (2007). Urgensi Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 14(2).

- Butarbutar, E. N. (2012). Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 354. <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>
- Hermawanti, K., Sopiyan, I. N., Nufus, H. Z., & Kuswandi, K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 233–248. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4687>
- Huda, M. N. (2013). Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Globalisasi Hukum. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v2i2.1932>
- Loho, A. C. A. (2019). Alasan Pemberat Dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 8(12).
- Lubis, J. T., Gultom, E., & Somawijaya, S. (2021). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang Terindikasi Tindak Pidana Melalui Lembaga Kepailitan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 250–261. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14132>
- Mulyadi, D. (2017). UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN JUAL BELI TANAH. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.798>
- Ningsih, I. W., & Din, M. (2022). Tindak Pidana Penipuan Karena Utang Piutang (Suatu Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(1).
- Prasetyo, R. D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*. Universitas Brawijaya.
- Putra, S. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 197. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2794>
- Putri, B. T., & Zakaria, C. A. F. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 2(1).
- Suherman, A. (2020). Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 29–45. <https://doi.org/10.33369/jsh.29.1.29-45>
- Syarif, N. (2020). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan. *Jurnal Keadilan*, 18(1).
- Zega, R. A. J., Pangkarego, O. A., & Sompie, E. (2021). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Lex Crimen*, X.

C. LAINNYA

Auli, R. C. (2023, December 7). *Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*. Hukumonline.Com.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023.

Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

Tim detikNews. (2022, August 12). Buaian Indra Kenz Jerat 144 Orang dengan Total Kerugian Rp 83 M! *Detikjabar*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).